

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif terutama dalam dunia perpolitikan memang sangat diperlukan, dengan adanya perempuan ikut andil dalam dunia politik setidaknya, yang menjadi keterwakilan tersebutlah. Bisa menjadi penyambung dari pada aspirasi-aspirasi masyarakat. Jadi untuk itu perempuan harus berkiprah di ranah politik. Sudah banyak anggapan bahwa dunia politik hanya di geluti oleh kaum laki-laki. Namun hal ini perlu diketahui bahwa perempuan pun berhak ikut serta dalam dunia perpolitikan di Indonesia terkhusus di Kabupaten Purwakarta ini.

Perempuan, berdasarkan jumlah yang mencakup separuh dari keseluruhan jumlah anggota masyarakat di segala tempat di dunia. Apakah hal ini tidak berarti bahwa perempuan seharusnya merupakan separuh solusi dari semua persoalan yang muncul di masyarakat. Kabupaten Purwakarta yang tengah membangun perdamaian dan bertransisi, ini sama artinya dengan mempertanyakan dimana peran, kesempatan, dan keterlibatan perempuan dalam proses-proses yang dijalankan dalam politik. Dalam rehabilitas dan rekontruksi, reintegrasi dan desentralisasi ternyata masih menyisakan persoalan-persoalan perminggiran perempuan secara sosial politik dan ekonomi. Indikasi dalam hal ini dapat ditemukan dengan meningkatkannya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan baik di wilayah domestik maupun publik, tingginya tingkat kemiskinan perempuan, menurunnya kesehatan ibu dan anak, ketidakadilan distribusi bantuan,

Serta minimnya perlindungan hukum bagi perempuan, sehingga kesemuanya berdampak pada kesejahteraan dan keberlangsungan masyarakat. Hal ini berarti bahwa transisi dan transformasi yang terjadi di Kabupaten Purwakarta saat ini masih belum dilihat sebagai bagian dari persoalan pembangunan, perdamaian, dan demokrasi.

Partisipasi perempuan menjadi hal penting untuk memastikan bahwa perempuan sebagai kelompok yang dominan dalam masyarakat tidak ditinggalkan dan dirugikan dalam pembangunan perdamaian dan transisi yang tengah berlangsung. Di Kabupaten Purwakarta, masyarakat sekarang membutuhkan peran perempuan dalam segala aspek, baik pendidikan, sosial ekonomi, hukum, politik, dan lain-lain. hal tersebut dipengaruhi oleh tuntutan bangsa atas nama masyarakat yang mengelobal, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan bagaimana bangsa tersebut peduli dan memberi akses atau peluang yang luas bagi perempuan untuk beraktifitas dan berkecimpung di ranah publik termasuk politik.

Di berbagai masyarakat termasuk di sebagian wilayah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Maupun dalam kalangan tertentu terdapat dalam masyarakatnya yang dapat kita jumpai yaitu nilai dan aturan negara, ataupun dalam pendidikan formal sekaligus. Keterwakilan perempuan di dalam parlemen merupakan bagian dari agenda perjuangan kesetaraan dan keadilan gender di seluruh dunia, begitu pula dengan Kabupaten Purwakarta saat ini. Jumlah yang begitu timpang antara laki-laki dan perempuan di dalam tubuh parlemen disinyalir

merupakan salah satu faktor dari belum terbentuknya infrastruktur hukum yang berkeadilan gender.

Dengan demikian, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Kabupaten Purwakarta dalam parlemen diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam proses perpolitikan, dalam problematika mengenai partisipasi perempuan dalam politik, khususnya keterwakilan perempuan di ranah parlemen tidak hanya persoalan kuantitas, tetapi juga bagaimana kualitas politisi perempuan itu sendiri. Hal ini tentunya menyangkut bagaimana politisi perempuan yang duduk di parlemen mampu peka dan tanggap terhadap permasalahan gender sehingga mampu memperjuangkan hal tersebut dan menghasilkan produk hukum yang adil.

Dilihat dalam persoalan representasi perempuan dalam politik di Indonesia tentunya. Terdapat tiga persoalan, persoalan pertama yaitu mengenai hubungan perempuan dan partai politik sendiri yang masih ketimpangan sehingga demokrasi berlangsung tidak sehat. Kedua yaitu kualitas internal partai memiliki pengaruh terhadap kondisi persoalan rekrutmen, seleksi dan regenerasi politisi. Ketiga yaitu terkait dengan kualitas individu politisi yang masih rendah.

Patriarki merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni, suatu ideologi yang membenarkan penguasaan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Kabupaten Purwakarta jika dilihat dalam hal ini masyarakat telah sedikit terhegemoni, bahwa terdapat pemisahan peran dan adanya ketimpangan yang amat jelas antara perempuan dan laki-laki. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat terutama dalam perempuan itu sendiri, yang belum memiliki

kesadaran penuh atas adanya hegemoni patriarki ini yang seringkali mensubordinasikan perempuan.

Partai politik memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang kualitas dan kuantitas perempuan untuk masuk ke dalam politik. Partai politik merupakan wadah untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.¹ Kualitas dan kuantitas adalah dua hal yang penting harus diperhatikan dalam rangka mendorong partisipasi perempuan di dalam politik. Partai politik ini harus bisa terbebas dari stereotip yang menganggap bahwa politik merupakan ranah maskulin yang tidak cocok untuk perempuan. Untuk itu penting dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik dengan meningkatkan kesadaran akan peluang yang sudah ada, yaitu dengan membangun kepercayaan diri dan keterampilan yang dimiliki oleh perempuan. Hal ini diperlukan sehingga kehadiran perempuan dalam arena politik tidak hanya sebatas formalitas belaka.

Tidak hanya itu, di dalam sistem juga harus turut mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik ini. Sistem yang dimaksud di sini yaitu mencakup sistem perekrutan kader-kader baru, pemberdayaan kader, serta sistem pemilu yang diterapkan. Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen sejatinya tidak hanya berbicara agar perempuan mampu mengakomodir kepentingan semata saja. Akan tetapi terdapat nilai yang lebih dalam lagi, yaitu mempunyai etika kepedulian yang menggambarkan cara khas perempuan dalam bereksistensi dalam relasi antarindividu. Dalam memutuskan sebuah kebijakan, standar moral laki-laki tidak

¹ Wawancara langsung, dengan Ibu Puji Sri Utami, selaku anggota *Dewan Perwakilan Rakyat*, yang menduduki partai Gerindra. Pada tanggal 14 Januari 2019.

bisa dijadikan sebagai tolak ukur utama. Karena unsur-unsur utama moralnya adalah kepedulian pada orang lain yang secara konkret didasarkan pada empati, kebaikan hati atau belas kasihan, hal tersebutlah yang merupakan ciri khas dari perempuan.

Persoalan dalam ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan termasuk di Kabupaten Purwakarta ini masih relatif rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan peran perempuan sudah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi DPR. Peraturan ini dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang di dalamnya juga mengatur pemilu tahun 2009.

UU No. 2 Tahun 2008 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Kemudian di bahas dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memeneuhi persyaratan menyertakan

sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Peraturan lainnya adalah dengan menerapkan *zipper system* yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008. Kedua kebijakan ini bertujuan untuk menghindari dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik.

Akibat dari adanya penurunan jumlah perempuan di parlemen ini mungkin sering terjadi karena adanya hambatan yang dialami calon legislatif perempuan dalam menjalankan pemilu. Hambatan tersebut dikarenakan masih kentalnya budaya patriarki yang seringkali mendiskriminasi perempuan, adanya beban berlapis yang ditanggung oleh perempuan di ruang privat dan ruang publik, dan adanya anggapan bahwa pendidikan dan kemampuan politik perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Masih kurangnya representasi perempuan dalam parlemen dapat diatasi dengan penguatan dan peningkatan angka batas kuota dalam rangka meningkatkan kemungkinan keterpilihan perempuan. Selain itu, penguatan kebijakan terkait penempatan caleg perempuan pada nomor urut teratas dan penambahan caleg perempuan dalam daftar calon di semua Dapil. Tak hanya itu, perlu adanya sanksi tegas pada partai politik jika tidak memenuhi ketentuan penempatan caleg perempuan sebanyak kuota yang ditetapkan. Hal ini menjadi penting, sebab UU partai politik dan pemilu ini merupakan salah satu parameter dalam melihat respons negara terkait kesetaraan gender.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen ini perlu menjadi perhatian penting. Karena kehadiran perempuan di parlemen mampu memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan, khususnya kesetaraan gender. Sebab seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan karena adanya perbedaan pengalaman dan kepentingan antara keduanya.

Mengenai kemampuan berpolitik perempuan, terkadang kebanyakan dari laki-laki menganggap perempuan sebagai pihak lemah yang biasanya dianggap hanya pemanis dunia partai politik saja. Akan tetapi banyak dari sekarang perempuan yang sudah menunjukkan eksistensi serta kinerjanya di dalam politik. Yang hingga sekarang, terkhusus di daerah peneliti yaitu Kabupaten Purwakarta sudah banyak perempuan yang ikut aktif dalam dunia perpolitikan hingga masyarakat Purwakarta pun mengetahui, sehingga menjadi sorotan dalam masyarakat yang sedikit banyaknya mendongkrak popularitas dan citra partai yang menaungi politikus perempuan tersebut.

Terlebih sekarang sudah ditetapkan bahwa keterwakilan yang 30% perempuan harus terpenuhi dalam setiap partai karena kalau tidak terpenuhi maka partai tersebut tidak akan dianggap ada kalau tidak ada keterwakilan atau keterlibatan perempuan dalam dunia politik ataupun partai tersebut. Dilihat dalam hal ini yang membuat seluruh partai politik berlomba-lomba mencari kandidat terbaik untuk dijadikan calon legislatif partai politik mencari kandidat perempuan yang berpengaruh di daerah termasuk daerah Kabupaten Purwakarta atau bahkan

sampai memenangkan artis untuk menarik perhatian publik, suara, citra sekaligus untuk memenuhi keterwakilan yang 30% tersebut.

Di jelaskan dalam politik identitas, bahwa dalam politik identitas yang menjadi salah satu bahasan yang terpenting untuk di kaji terkhusus dalam lembaga perpolitikan saat ini termasuk di Indonesia, terdapat isu mengenai politik identitas yang menjelaskan berdasarkan agama, jenis kelamin, etnis, dan lain sebagainya. Politik identitas adalah politik yang didasari atas kesamaan yang beranekaragam baik dilihat dari bentuk sosial maupun masyarakat. Politik identitas ini dimanfaatkan untuk mengantarkan hak-hak dari suara-suara demokrasi di berbagai belahan negara di dunia.

Menurut Macionis, ketimpangan ini dijumpai di berbagai bidang di dunia kerja, dalam pelaksanaan lebih cenderung menjadi korban kekerasan laki-laki daripada sebaliknya.² Adanya stratifikasi gender telah mendorong lahirnya gerakan sosial di kalangan kaum perempuan, yang bertujuan membela dan memperluas hak-hak kaum perempuan.

Berkenaan dengan istilah feminisme atau sering disebut gender, menurut Mansour Fakih belum ada definisi yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas.³ Bagi mereka, konsep gender adalah sifat yang melekat pada lawan laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural.

Max Weber dan Robert Michels memusatkan perhatian pada hubungan antara birokrasi dan demokrasi. Kedua tokoh ini berpandangan bahwa baik

²Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Edisi Revisi. 20014). Hal. 114

³ Muslim mufti, *Teori-teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 24

organisasi sosialis maupun kapitalis akan mempunyai kecenderungan untuk menjadi organisasi yang bersifat birokrasi dan oligarkis.⁴

Mengenai kemampuan berpolitik perempuan, kebanyakan dari laki-laki menganggap perempuan sebagai pihak lemah yang biasanya dianggap hanya pemanis dunia partai politik. Akan tetapi banyak pula perempuan yang sudah menunjukkan eksistensi dan kinerjanya di dunia politik, sehingga menjadi sorotan masyarakat yang sedikit banyaknya mendongkrak popularitas dan citra partai yang menaungi politikus perempuan tersebut.

Dalam hal ini membuat seluruh partai politik berlomba-lomba mencari kandidat terbaik untuk dijadikan calon legislatif.⁵ Partai politik mencari kandidat perempuan yang berpengaruh di daerah tertentu atau bahkan meminang artis. Untuk menarik perhatian publik, suara, citra sekaligus untuk memenuhi keterwakilan 30%. Dalam negara demokrasi, keterlibatan/partisipasi perempuan dan laki-laki pada posisi penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan akan berdampak pada keseimbangan masyarakat di semua tingkatan secara akurat dan akan terjadi pencapaian tujuan untuk menciptakan keadilan.

Dari fakta yang peneliti lihat melalui sebuah pengamatan-pengamatan sementara, bahwa perempuan juga mampu dan berhak menduduki jabatan-jabatan yang dulu pernah di pegang oleh laki-laki. Dan yang ingin dikaji saat ini, peneliti ingin lebih lanjut menanyakan tentang, bagaimana respon keterwakilan perempuan di Kabupaten Purwakarta atas keterlibatan di dalam jabatan-jabatan politik.

⁴Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Edisi Revisi. 2004). Hal. 76

⁵ Wawancara langsung, dengan bapak Sofyan selaku administrasi di dalam *Dewan Perwakilan Rakyat*. Kabupaten Purwakarta. Pada tanggal 3 Januari 2019.

Terlebih sekarang dengan adanya 30% representasi perempuan dalam politik. Sehingga sekarang partai-partai politik mulai berlomba-lomba memilih dan mencari kandidat perempuan untuk ikut terjun ke ranah politik. Sehingga partai politik sekarang yang ada di Kabupaten Purwakarta cara memilih atau perekrutan anggota dengan sistem tembak atau asal tunjuk, asal tunjuk namun berkualitas sehingga pantas untuk dijadikan anggota partai, namun dengan cara memilihnya berdasarkan orang dalam yang sudah duduk di lembaga legislatif, dengan adanya ikatan kedekatan. Untuk di jadikan anggota di dalam partai tersebut.

Ada juga partai yang memilih anggotanya, berdasarkan benar benar anggota dari partai tersebut yang sudah aktif, dan sudah memiliki kartu anggota.⁶ Boleh melanjutkan ikut serta dan berlomba-lomba menunjukkan eksistensinya di dalam dunia perpolitikan, dengan cara mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan atau lembaga legislatif. ternyata dari keharusan 30% di dalam politik keterwakilan perempuan. Partai politik selain berlomba-lomba mencari kandidat perempuan, cara perekrutan perempuan dengan cara di ambil langsung dengan cara pilih menurutnya layak dan pantas untuk masuk dan terjun di dalam politik, untuk menduduki kursi yang sudah disediakan di lembaga legislatif partai politik yaitu keterwakilan perempuan. Dari kebanyakan keterwakilan masuk dunia politik mereka awalnya tidak tahu, harus bagaimana dan harus ngapain karena dengan adanya ketetapan minimal 30% yang menjadi keterwakilan tersebut maka yang ditunjuk langsung tersebut harus ikut andil dalam lembaga legislatif guna untuk

⁶ Wawancara langsung dengan, Ibu Enah Rohayah. Selaku anggota aktif di dalam partai *Golongan Karya*(Golkar). Pada tanggal 8 Januari 2019.

memenuhi dari keterwakilan perempuan di dalam parlemen sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Setelah adanya seperti itu peneliti ingin lebih lanjut menanyakan tentang, bagaimana respon keterwakilan perempuan di Kabupaten Purwakarta atas keterlibatan di dalam jabatan-jabatan politik.

Dengan adanya penelitian ini peneliti lebih tertarik untuk mengkaji judul yang peneliti ajukan yaitu mengenai representasi perempuan dalam partai politik. Peneliti ingin lebih tahu seberapa banyak respon masyarakat mengenai adanya ketentuan minimal 30% perempuan harus terlibat dalam dunia perpolitikan. Terlebih di Kabupaten Purwakarta. Juga ingin lebih tahu seberapa keberhasilan partai dalam melibatkan perempuan di dalam politik, serta ingin meneliti lebih dalam tentang perekrutan partai dalam menarik anggota baru.

Untuk melihat seberapa keterlibatan perempuan dalam jabatan politik di Kabupaten Purwakarta yang di rumuskan dalam latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti kembali tentang: Mekanisme dalam pengkaderan perempuan dalam partai politik, representasi perempuan partai politik dan hasil dari pencapaian representasi perempuan dalam partai politik di Kabupaten Purwakarta.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang yang di permasalahan di atas, maka dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Masalah yang menonjol dalam penelitian ini yaitu, peneliti melihat bahwa Peran gender dalam masyarakat ternyata dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan terutama dalam bidang pekerjaan.
2. Adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional yang menjadikan perempuan tidak bisa tampil sebagai pemimpin.
3. Terdapat kesan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki dengan otomatis bahwa perempuan tidak bisa mengikuti hal itu. Namun kesan ini muncul akibat adanya *image* yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik yang beranggapan bahwa dunia politik itu kotor, keras, penuh intrik dan semacamnya.
4. Sehingga mengakibatkan dibelahan dunia manapun jumlah wanita yang terjun di dalam politik relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan hak asasinya lebih tinggi.
5. Dengan menyadari akan kepentingan dan peran mereka yang berbeda-beda. Sehingga berbicara mengenai gender juga menyatakan secara tidak langsung perlunya keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam politik untuk memahami secara tidak langsung perubahan dalam hubungan gender, yang akan di perlakukan jika adanya keseimbangan yang lebih adil dan setara antara jenis kelamin dalam masyarakat tercapai.⁷

⁷Mansour Fakih, *Gender dan Pembangunan*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2007). Hal.9

6. Salah satu masalah yang dihadapi kaum perempuan di berbagai masyarakat adalah adanya diskriminasi terhadap perempuan yang termasuk di bidang pekerjaan itu sendiri.
7. Mengenai kemampuan berpolitik perempuan, kebanyakan dari laki-laki menganggap perempuan sebagai pihak lemah yang biasanya dianggap hanya pemanis dunia partai politik saja.
8. Akan tetapi banyak dari perempuan sekarang yang sudah membuktikan dan menunjukkan eksistensi serta kinerjanya di dalam dunia politik, yang sehingga menjadi sorotan masyarakat yang sedikit banyaknya mendongkrak popularitas dan citra partai yang menaungi politikus perempuan tersebut.

1.3.Rumusan Masalah

Pada latarbelakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengkaderan perempuan dalam partai politik di Dapil 1 Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana representasi perempuan dalam partai-partai politik di Dapil 1 Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana hasil pencapaian representasi perempuan dalam partai politik di Dapil 1 Kabupaten Purwakarta?

1.4. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengkaderan dalam partai politik di Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui representasi perempuan dalam partai-partai politik di Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui hasil dari pencapaian representasi perempuan dalam partai politik di Kabupaten Purwakarta.

1.5. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial yakni sosiologi politik khususnya dalam hal peran perempuan berpolitik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat guna memberikan manfaat. Penelitian ini diharapkan mampu dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi dalam bidang komunikasi untuk menambah wawasannya dalam hal komunikasi gender dan dalam hal ini adalah perempuan yang terjun

di partai politik, menambahkan sebuah nuansa baru bagi siapa saja yang membacanya.

1.6.Kerangka Pemikiran

Pengertian politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian suatu kekuasaan dalam masyarakat dimana yang wujudnya yang membuat proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih sebuah kekuasaan. Baik itu secara konstitusional maupun non-konstitusional. Mengacu pada definisi politik, maka dapat diketahui bahwa terdapat tujuan politik itu sendiri. Tujuannya yaitu politik pada umumnya yang dimana untuk mengupayakan agar kekuasaan di masyarakat dan pemerintahan dapat diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum yang telah berlaku. Untuk itu juga dapat mengupayakan agar kekuasaan yang ada di dalam masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengelola serta menerapkannya demokrasi yang secara menyeluruh.

Terdapat pengertian gender, gender merupakan seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan yang akibatnya membentuk sebuah budaya dengan satu lingkungan masyarakat, tempat manusia tumbuh dan dibesarkan, hal ini artinya terdapat perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang sudah dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau bisa populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, terutama hasil belajar seseorang yang melalui suatu proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, di mana ia tumbuh dan dibesarkan.

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat karena masalah gender adalah masalah yang sangat intens dan proses pencarian solusinya perlu dilakukan secara komprehensif. Dalam kaitan dengan itu muncullah aliran-aliran pemikiran yang lebih kita kenal dengan sebutan feminisme. Feminisme tidak dapat melepaskan dirinya dari konteks politik.

Berkenaan dengan istilah feminisme atau sering disebut gender, menurut Mansour Fakih belum ada definisi yang mampu menjelaskan secara singkat dan jelas. Mereka menghendaki pemisahan gender dan seks. Artinya, secara kodrati tidak perlu dipermasalahkan, tetapi secara sifat, hal itu perlu diperhatikan. Bagi mereka, konsep gender adalah sifat yang melekat pada lawan laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Dengan demikian, teori feminisme juga menjadi titik balik cara permasalahan personal yang dialami kaum perempuan diangkat ke ranah politik dan sosial.

Di pandang dari sosiologi politik bahwa sebuah penyelidikan antara masalah-masalah yang berkesinambungan antara masyarakat dan politik. Yaitu membahas struktur, kebudayaan, tingkah laku, pendekatan dan perkembangan. Konsep sosiologi politik menyangkut empat konsep yaitu sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik. Sosialisasi politik adalah pengenalan seseorang terhadap sistem politik, persepsi di dalam politik termasuk terhadap gejala-gejala politik, partisipasi politik adalah keterlibatan seseorang di dalam politik, rekrutmen politik adalah pendaftaran seseorang untuk

mendapatkan jabatan, komunikasi politik adalah proses pengalokasian informasi dari sistem politik dan sistem sosial.⁸

Miriam Budiardjo melihat politik sebagai ilmu pengetahuan berangkat dari titik tekan pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai cara dalam meneliti gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik. Segala aktivitas politik yang dipraktikkan oleh kelompok manusia di atas pada gilirannya menjadi fenomena sosial yang sifatnya terus-menerus dan abadi. Ini artinya, berangkat dari fenomena tersebut, politik dapat dikatakan sebagai gejala serba hadir di mana-mana. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan kematian, tidak peduli apakah kita ikut terlibat langsung atau memengaruhi proses politik atau tidak. Karena manusia selalu bersentuhan dengan politik, Aristoteles pernah mengatakan bahwa, manusia adalah binatang politik (*zoon politicon*), bisa dikatakan dimana pun dia ada, dia pasti ada dalam masyarakat politik dengan jenisnya sendiri. Dalam konteks demikian, politik itu sendiri menurut Aristoteles adalah *master of science*. Dengan pengertian, *science* bukan dalam arti ilmu pengetahuan (*scientific*), melainkan kunci bagi masyarakat dalam segala aktivitas kehidupannya.

Secara sosiologi terdapat partisipasi politik, partisipasi politik ini merupakan tingkat kesadaran optimal dan kualitas integritas mental dan moral yang memotivasi setiap individu untuk melakukan berbagai aktivitas sikap dan perilaku dalam lingkup sistem politik yang sedang berlangsung. Pada sisi lain partisipasi politik sebagai kepuasan tersendiri yang tumbuh dalam sanubari warga

⁸ Yesmi Anwar, *sosiologi untuk universitas*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 352

negara bahwa warga negara dapat berperan sebagai subjek pelaku yang mewarnai kehidupan pemerintahan dan kehidupan negara.⁹

Pandangan Aritoteles tersebut, jelas bahwa dimensi politik dalam keberadaan manusia merupakan dimensi terpenting. Sebab politik memengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan umat manusia. Di samping itu, politik sesungguhnya juga tidak berarti merebut ataupun mempertahankan kekuasaan belaka, tetapi lebih dari itu, politik berarti mengatur apa yang semestinya dilakukan dan apa yang semestinya tidak dilakukan.

Terdapat salah satu pemikiran politik yang terdapat dalam buku-bukunya adalah tentang konsep negara. Konsep Mawardi tentang negara seperti halnya Abi Rabi', dimulai dengan penjelasannya mengenai hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia menurut Mawardi adalah makhluk lemah dan paling banyak kebutuhannya. Untuk itu, ia memerlukan kerja sama. Tujuan Allah menciptakan manusia dengan keadaan lemah dan paling banyak kebutuhan.

Namun demikian, Allah tidak akan membiarkan manusia dalam keadaan lemah. Kelemahan manusia, sehingga tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri, terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan. Semua itu mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu, akhirnya sepakat untuk mendirikan negara.

Dalam gerakan politik, salah satu wajah gerakan yang memfenomena dan menjadi gejala serba hadir dalam setiap komunitas masyarakat atau negara, hal ini

⁹ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 148

adalah gerakan sosial (*social movement*) ataupun gerakan sosial baru (*new social movement*). Gerakan ini, dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan dan perubahan, baik orientasi maupun model gerakan. Hal ini terjadi karena mengikuti isu sosial yang cenderung berubah-ubah pula. Khususnya, isu yang lahir dari dominasi negara dan globalisasi. Misalnya isu diskriminasi terhadap perempuan dan pemanasan global. Isu yang pertama biasanya melahirkan gerakan sosial “gender”,

Terpenting dari semua itu, berbicara seputar “gender dan pembangunan” yang termasuk pembangunan dalam politik, karena ini menegaskan kenyataan bahwa inisiatif pembangunan apa pun akan mempengaruhi kehidupan kaum laki-laki dan perempuan. Dan sama sekali tidak mungkin mengubah dinamika masyarakat dengan cara tertentu sehingga hanya laki-laki atau perempuan saja yang terpengaruh dalam dunia politik. Dengan menyadari kepentingan dan peran mereka yang berbeda-beda, dan akan tiba pada posisi yang jauh lebih baik untuk memahami proses perubahan sosial tersebut. Dan berbicara mengenai gender juga menyatakan secara tidak langsung perlunya keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam politik untuk memahami secara tidak langsung perubahan dalam hubungan gender, yang akan di perlakukan jika adanya keseimbangan yang lebih adil dan setara antara jenis kelamin dalam masyarakat tercapai.¹⁰

Konsep dan praktik gerakan sosial baru, apabila dilihat dari sisi tahap-tahap perkembangannya, dapat dipetakan sebagai berikut:

¹⁰ Mansour Fakih, *Gender dan Pembangunan*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 2007). Hal.9

1. Muncul gerakan-gerakan seperti gerakan demokrasi dan gerakan buruh di Eropa, gerakan pemerataan hak suara yang diajukan oleh kaum perempuan, dan gerakan-gerakan kemerdekaan di daerah jajahan di tahun-tahun berikutnya. Gerakan sosial baru tahap ini hanya menyediakan sebuah sarana efektif bagi pengungkapan keluhan-keluhan dan usaha untuk melahirkan perubahan-perubahan politik.
2. Tahap suasana ketika pencapaian pemerintahan yang representatif, persamaan hak pilih universal, dan pemilihan umum yang bebas dan rahasia berusaha mengurangi intensitas aksi-aksi politik di luar mekanisme lembaga formal. Walaupun dalam periode krisis gerakan sosial, seperti gerakan para penganggur dan kaum fisi di beberapa negara Eropa dapat berkembang. Dalam politik terdapat hak perempuan untuk memilih dan dipilih. Kalau selama beberapa dasawarsa kita telah menyaksikan keikutsertaan kaum perempuan di negara kita dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat II, maupun dalam pemilihan untuk memilih kepala desa, tentu tidak membayangkan bahwa di masa lalu kaum perempuan tidak mempunyai hak pilih. Namun perlu diingat bahwa salah satu ketidak-samaan bidang politik yang hingga kini masih dialami kaum perempuan dalam banyak masyarakat tidak dimilikinya hak memilih dan dipilih

Berkat perjuangan, semenjak pertengahan abad ke 19, maka sejak 1893 barulah kaum perempuan di berbagai negara Barat mulai meraih hak pilih. menunjukkan bahwa antara tahun 1893 dan 1928 hak pilih diraih kaum

perempuan di 18 negara di Eropa, Amerika, Afrika dari data tersebut nampak pula bahwa di sejumlah negara Eropa seperti Perancis dan Yunani kaum perempuan baru mengenal hak pilih setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Masih relatif terbatasnya jumlah posisi di dalam ranah publik yang berhasil diraih kaum perempuan, seperti misalnya di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif di tingkat lokal, regional maupun nasional sering dijadikan indikasi mengenai besarnya kesenjangan antara peraihan status perempuan dan laki-laki di bidang politik.¹¹ termasuk sekarang di Kabupaten Purwakarta bahwa masih banyak yang aktif kaum perempuan dalam mempuni dibidang politik sehingga dengan adanya begitu sekarang yang menjabat sebagai Bupati Purwakarta pun terwakilkan oleh perempuan dengan adanya begitu perempuan bisa terbukti bahwa perempuan pun bisa lebih kuat dan mampu dalam menangani dan memberikan solusi di setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam ranah politik untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam keberadaannya di tengah masyarakat perempuan tidak bisa luput dari berbagai sudut pandang yang menyertainya. Boleh jadi orang mengarikulasi perempuan berdasarkan sudut pandang ciri-cirinya, perannya dalam masyarakat, keluarga, pendidikan dll. Adapaun perempuan menurut pandangan sejarah memainkan banyak peran perempuan sebagai ibu, istri, petani, pengelola perusahaan, pekerja sukarela, kepala desa dll. Lebih dari itu peran perempuan yang terdapat di purwakarta dan indonesia pada umumnya, telah sangat berperan dalam bidang politik pemerintahan seperti menjadi Presiden Republik Indonesia,

¹¹*Ibid.*, hal 116

Gubernur, Menteri, Bupati, Camat, dan lain sebagainya. Hal ini semakin menegaskan bahwa perempuan dalam kehidupannya tidak hanya memainkan peran ganda tetapi multi peran dalam masyarakat.

Dalam sejarah perpolitikan di Indonesia dan negara berkembang pada umumnya, peranan perempuan memang dipandang terlambat dalam keterlibatan di dunia politik. Stigma-stigma bahwa perempuan dalam posisi domestik dianggap sebagai salah satu hal yang mengakibatkan perempuan terlambat berkisah dalam dunia politik. Sebagai salah satu indikatornya adalah jumlah perempuan yang memegang jabatan publik masih sangat sedikit.

Menyertakan perempuan dalam proses pembangunan bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaanya di bidang pembangunan merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Bahwa perempuan baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber insan pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segenap kegiatan pembangunan di segala bidang kehidupan.

GAMBAR 1.1
SKEMA KONSEPTUAL

